



BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR: 100.3.3.2 / 405 / 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, efektivitas, serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di Kabupaten Purworejo perlu disusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XLI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan:

- a. dokumen perencanaan pembangunan di tingkat Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo untuk Tahun 2025; dan
- b. landasan dan pedoman operasional bagi Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan di Kabupaten Purworejo Tahun 2025 dan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025.

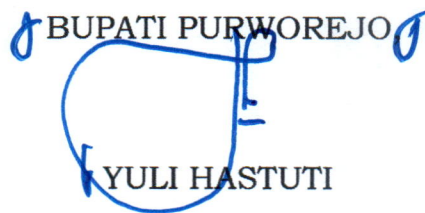
KETIGA : Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo;
- b. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo;
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo;
- d. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo;
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo;
- g. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo;
- h. Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo;
- i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo;
- j. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo;
- k. Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo;
- l. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Purworejo;
- m. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo;
- n. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo;
- o. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo;
- p. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo;
- q. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo;
- r. Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo;
- s. Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo;

- t. Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo;
- u. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Purworejo;
- v. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo;
- w. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purworejo;
- x. Inspektorat Kabupaten Purworejo;
- y. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purworejo;
- z. Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo;
- aa. Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo;
- bb. Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo;
- cc. Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo;
- dd. Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo;
- ee. Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo;
- ff. Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo;
- gg. Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo;
- hh. Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo;
- ii. Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo;
- jj. Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo;
- kk. Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo;
- ll. Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo;
- mm. Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo;
- nn. Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo; dan
- oo. Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 26.06.2025

BUPATI PURWOREJO

YULI HASTUTI

LAMPIRAN XXIV
KEPUTUSAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR:
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

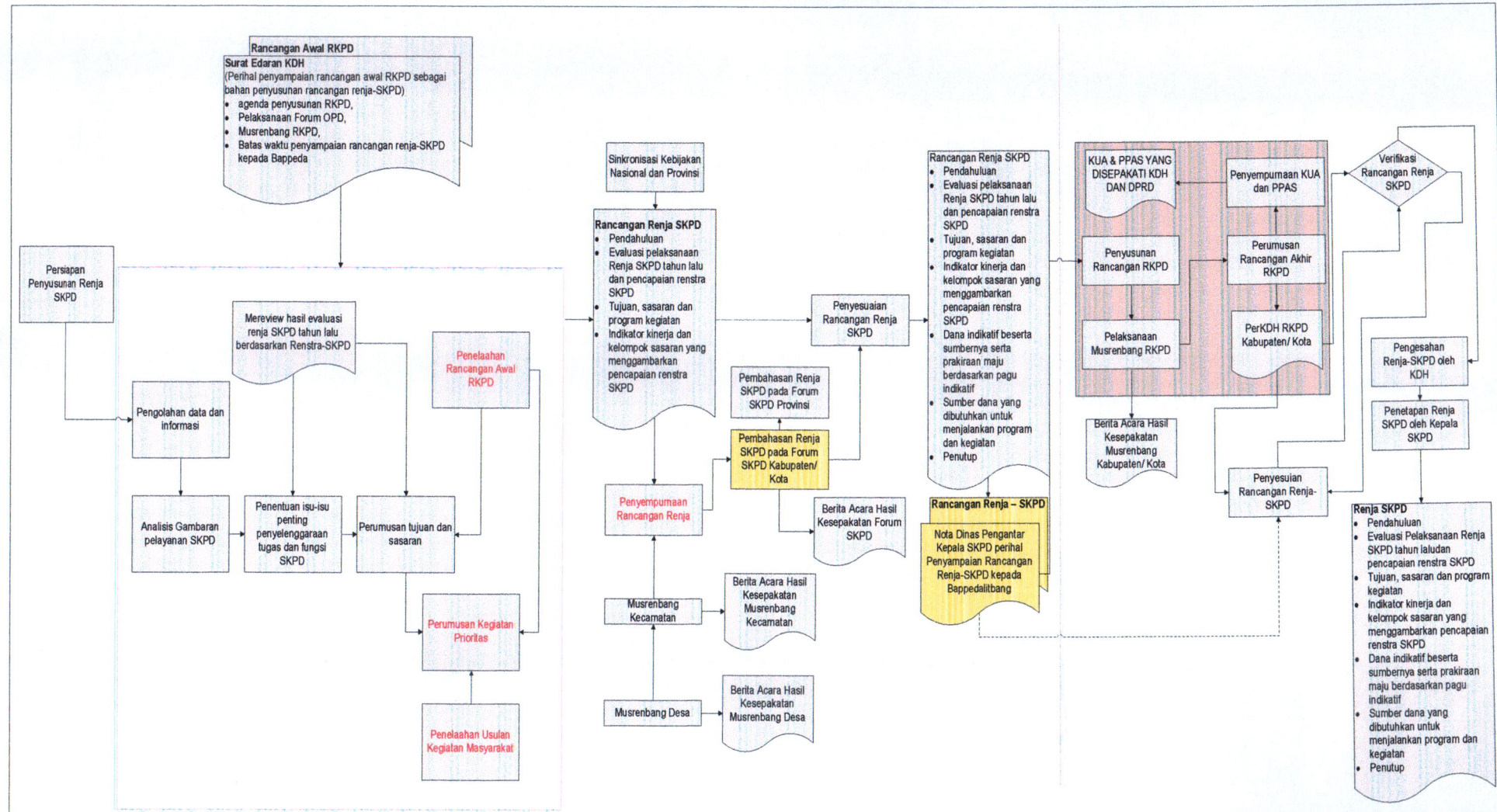
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). UU Nomor 25 tahun 2004 pada pasal 7 juga menyatakan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah harus membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi Masyarakat.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari beberapa tahapan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah. Tahapan-tahapan penyusunan tersebut meliputi :

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Pelaksanaan tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah dapat dilihat pada gambar 1.1

Gambar 1.1
Tahapan Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah



Perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari perencanaan pembangunan nasional memiliki saling keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan lain. Renja Perangkat Daerah mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, dimana Renja Perangkat Daerah menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) kedalam rencana, program dan penganggaran tahunan.

Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun sebelumnya serta melihat dinamika permasalahan yang berkembang dan kebutuhan masyarakat. Penetapan tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju serta penyelarasan program kegiatan dilakukan sesuai skala prioritas daerah sebagai upaya mensinergikan pencapaian sasaran dan target Renstra SKPD dan RPJMD tahun perencanaan.

Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan Perangkat Daerah secara lebih kongkrit dan terukur. Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa Dokumen Rencana Kerja yang telah disusun tersebut apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan maka dapat dilakukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun berkenaan Kondisi tersebut meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dan atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan

Sesuai amanat tersebut maka Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Tahun 2024 telah

menyusun Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025. Seiring dengan pelaksanaan Renja Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I ternyata terdapat berbagai perkembangan situasi dan kondisi pelaksanaan yang mempengaruhi tercapainya target sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Inspektorat pada tahun 2025. Atas dasar hal tersebut maka Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo melaksanakan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 untuk menyesuaikan kembali perencanaan yang sudah berjalan dengan perkembangan kondisi saat ini sehingga target sasara kinerja tahun 2025 dapat tercapai.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 adalah :

1. Pasal 18 ayat (16) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287)
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dalam Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 13);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
17. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 144 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 144 Seri E Nomor 74) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 144 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 31 Seri E Nomor 30);
18. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025;
19. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 55 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 (Berita Daerah Tahun 2024 No.55)
20. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 70 Seri D Nomor 2);
21. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 15 Seri E Nomor 13).

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 dimaksudkan diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Memenuhi kebutuhan akan adanya perkembangan yang terjadi pada saat ini yang mempengaruhi perencanaan sebelumnya sehingga diperlukan penyesuaian terhadap dokumen perencanaan tersebut

agar dapat mengakomodir perkembangan pada saat ini sehingga target yang ditetapkan dapat tercapai.

- b. Mengevaluasi Rencana Kerja Inspektorat Daerah sampai dengan triwulan I;
- c. Memenuhi ketentuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah;

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja anggaran perubahan (RKAP) Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD) Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

Berisi tentang evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah sampai dengan Triwulan I tahun berkenaan, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, dan Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja memperhatikan Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi, kabupaten/ kota sampai dengan Triwulan I Tahun berkenaan.

2.1. Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan I Tahun Berkenaan.

Pada Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo melaksanakan 3 program, 12 kegiatan. dan 50 Sub kegiatan. Adapun capaian target dan realisasi kinerja program Inspektorat Daerah sampai dengan triwulan I, adalah sebagai berikut :

1. Realisasi pogram/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai dengan Triwulan I antara lain:

- a. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Hal ini dikarenakan penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD dan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD belum dilaksanakan sesuai rencana kerja dan anggaran kas yang telah ditetapkan.

- b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Hal ini dikarenakan untuk sub kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan terdapat perubahan jadwal pelaksanaan karena ada menyesuaikan agenda kegiatan para peserta dan narasumber kegiatan.

- c. Pengawasan Internal.

Hal ini dikarenakan untuk sub kegiatan Reviu Laporan Kinerja masih terdapat agenda rapat evaluasi Pelaksanaan Reviu LPPD Tahun 2024 yang belum terlaksana.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, pencapaian target keluaran kegiatan telah terpenuhi semua selain kegiatan diatas yang tidak tercapai target kinerjanya. Pada Triwulan I ini terdapat 3 sub kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan yaitu Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Bahan/Material dan Reviu Laporan Keuangan.

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Secara umum kegiatan yang dilaksanakan dapat memenuhi target kinerja keluaran yang telah direncanakan, karena telah dilakukan monitoring dan evaluasi realisasi kinerja secara berkala dan ditindaklanjuti dengan pergeseran anggaran kas dan target kinerja menyesuaikan kebutuhan dan perubahan jadwal kinerja. Sampai dengan Triwulan I, program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Daerah tidak terdapat subkegiatan yang realisasinya melampaui target yang direncanakan.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapai/terpenuhi/melebihi target kinerja program/kegiatan;

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan Inspektorat Daerah berkaitan erat dengan tugas pokok yang dimiliki Inspektorat melalui fungsinya sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dengan melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya, pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu, perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan, dan pelaksanaan pendampingan dan asistensi. Selain itu juga terkait dengan pendukung pelaksanaan fungsi Inspektorat Daerah baik sarana prasarana, peningkatan kapabilitas APIP maupun administrasi penunjang urusan pemerintahan daerah.

Adapun faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program dan kegiatan diantaranya:

- Keterlambatan jadwal pengadaan barang jasa yang dibutuhkan oleh Inspektorat dan adanya perubahan rencana kebutuhan barang milik daerah.

- Pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan tidak tepat waktu yang mengakibatkan penyelesaian laporan hasil pengawasan juga terlambat;
- Adanya mandatori penugasan diluar PKPT yang harus dilaksanakan mengakibatkan target pengawasan di PKPT menjadi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.

Sedangkan faktor-faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan secara umum yaitu :

- Pelaksanaan subkegiatan sesuai Rencana Kerja Operasional (RKO) yang disusun dan anggaran kas yang direncanakan.
 - Monitoring dan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin/berkala untuk memastikan pelaksanaan kinerja sesuai dengan target yang direncanakan dan dapat segera melakukan penyesuaian target kinerja apabila ada perubahan kebijakan.
 - Pengawasan internal telah direncanakan dalam dokumen PKPT yang didalamnya telah mempertimbangkan mandatori pengawasan dan ketersediaan anggaran untuk pelaksanaannya.
 - Beberapa mandatory penugasan baru diperintahkan pada awal tahun dan harus dilaksanakan dengan berbatas waktu dalam penyelesaiannya sehingga dalam penugasan diprioritaskan dalam pelaksanaannya ataupun dengan penugasan tumpang/bersamaan waktunya.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
- Implikasi yang timbul akibat tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan adalah sebagai berikut :
- Menambah beban target kinerja pada pelaksanaan tahun berikutnya untuk mencapai target program/kegiatan dalam Renstra yang ditetapkan apabila target capaian program/kegiatan tidak terpenuhi.
 - Tidak terlaksananya target program/kegiatan maupun mundurnya waktu pelaksanaan program/kegiatan dalam Renstra apabila target capaian program/kegiatan tidak terpenuhi.
 - Realisasi anggaran tidak terealisasi secara maksimal apabila target capaian program/kegiatan tidak optimal.
 - Kurang optimalnya pencapaian tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil dan dilakukan yaitu :

- Penjadwalan ulang kegiatan yang belum dilaksanakan dengan tetap mengutamakan prinsip 3 E (ekonomis, efektif dan efisien) dalam untuk memaksimalkan capaian output kegiatan.
- Perubahan desain kegiatan yang belum mencapai output kegiatan sesuai kondisi anggaran dan kebutuhan untuk percepatan pencapaian target.
- Perubahan anggaran menyesuaikan kondisi dan kebutuhan pelaksanaan untuk kegiatan yang belum teranggarkan sebelumnya melalui rekomposisi maupun pergeseran anggaran untuk mendukung capaian output kegiatan.
- Perubahan target capaian program, hasil kegiatan dan keluaran sub kegiatan sesuai kondisi dan hambatan yang ada dalam pelaksanaan kegiatan.
- Sinkronisasi Perubahan rencana Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2025 yang sudah mengakomodasi mandatory penugasan yang belum masuk dalam rencana penugasan dengan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Purworejo dan Pencapaian Renstra Inspektorat Kabupaten Purworejo s/d Triwulan I Tahun 2025 dapat diuraikan dalam tabel 2.1 berikut ini:

Tabel. 2.1
Evaluasi Hasil terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/kota
Renja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo
Periode Pelaksanaan: sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

No	Tujuan / Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (kondisi akhir)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (%)			Unit OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana (APBD, DAK,TP,lainnya)
													I		II												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)			(7)			(8)		(9)		(12 = 8+9)			(13=12/7*100%)			(14=12/5 x100%)			(15)	(16)
				K	Satu an	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp		
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan birokrasi yang bersih melalui pengawasan Internal yang berkualitas		Nilai Area Pengawasan Penguatan	3,19	skor		3,076	skor		3,12	skor		3,076				3,076	skor	0	98,59%	skor		96%	skor			
	Terwujudnya Peningkatan Sistem Pengendalian Intern		Tingkat Maturitas SPIP	3,5	level		3,317	level		3,33	level		3,317				3,317	level	0	99,76%	level		95%	level			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100	%	9.856.971.026	100	%	2.624.740.977	100	%	1.214.092.500	25	134.457.913			25	%	134.457.913	25,00%	%	11,07%	0%	%	28%	Inspektorat Daerah	APBD
			Persentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100	%	1.610.777.794	100	%	523.343.552	100	%	310.414.400	25	22.793.245			25	%	22.793.245	25,00%	%	7,34%	0%	%	34%	Inspektorat Daerah	APBD
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan pengawasan internal	35	Doku men	9.856.971.026	21	Dokum en	2.624.740.977	7	Doku men	1.214.092.500	2	134.457.913			2	Doku men	134.457.913	28,57%	Doku men	11,07%	66%	Doku men	28%	Inspektorat Daerah	APBD
		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	534	Lapo ran	1.830.533.011	400	Lapora n	427.952.090	74	Lapor an	146.334.000	3	9.338.750			3	Lapor an	9.338.750	4,05%	Lapor an	6,38%	75%	Lapor an	24%	Inspektorat Daerah	APBD
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	617	Lapo ran	1.127.458.373	502	Lapora n	395.910.980	96	Lapor an	109.746.700	26	18.771.700			26	Lapor an	18.771.700	27,08%	Lapor an	17,10%	86%	Lapor an	37%	Inspektorat Daerah	APBD
		Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	6	Lapo ran	205.122.457	6	Lapora n	25.258.400	1	Lapor an	17.711.400	2	3.660.000			2	Lapor an	3.660.000	100,00%	Lapor an	20,66%	133%	Lapor an	14%	Inspektorat Daerah	APBD
		Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	273	Lapo ran	690.616.723	133	Lapora n	191.967.050	30	Lapor an	100.300.400	28	32.915.950			28	Lapor an	32.915.950	100,00%	Lapor an	32,82%	59%	Lapor an	33%	Inspektorat Daerah	APBD
		Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	321	Lapo ran	1.113.947.288	273	Lapora n	395.639.693	98	Lapor an	250.000.000	11	21.976.605			11	Lapor an	21.976.605	11,22%	Lapor an	8,79%	100%	Lapor an	37%	Inspektorat Daerah	APBD
		Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	8	Kese pakat an	295.003.463	8	Kesepa katan	78.224.193	2	Kesep akata n	30.000.000	3	7.432.510			3	Kesep akata n	7.432.510	150,00%	Kese pakat an	24,78%	138%	Kesep akata n	29%	Inspektorat Daerah	APBD
		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	320	Doku men	4.594.289.710	290	Dokum en	1.109.788.571	6	Doku men	560.000.000	0	40.362.398			0	Doku men	40.362.398	0,00%	Doku men	7,21%	100%	Doku men	25%	Inspektorat Daerah	APBD
		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	10	Lapo ran	1.610.777.794	6	Lapora n	523.343.552	2	Lapor an	310.414.400	1	22.793.245			1	Lapor an	22.793.245	50,00%	Lapor an	7,34%	70%	Lapor an	34%	Inspektorat Daerah	APBD
		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	32	Lapo ran	606.743.178	20	Lapora n	112.169.115	10	Lapor an	70.000.000	0	822.510			0	Lapor an	822.510	0,00%	Lapor an	1,18%	63%	Lapor an	19%	Inspektorat Daerah	APBD

No	Tujuan / Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (kondisi akhir)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (%)			Unit OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana (APBD, DAK,TP,lainnya)			
				(5)			(6)			(7)			(8)		(9)			(12 = 8+9)			(13=12/7*100%)					(14=12/5 x100%)		
				K	Satu an	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K		Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan			Rp	K	Satuan
		Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	385	Lapo ran	1.004.034.616	404	Lapora n	411.174.437	121	Lapor an	240.414.400	26	21.970.735			26	Lapor an	21.970.735	100,00%	Lapor an	9,14%	100%	Lapor an	43%	Inspektorat Daerah	APBD	
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Bidang Fasilitasi Pengawasan	100	%	1.436.387.835	100	%	794.919.726	100	%	63.460.000	25	7.061.605			50	%	7.061.605	50,00%	%	11,13%	100%	%	56%	Inspektorat Daerah	APBD	
			Persentase Hasil Pendampingan dan Asistensi	100	%	8.030.956.376	100	%	1.848.974.566	100	%	1.278.853.500	25	142.810.520			50	%	142.810.520	50,00%	%	11,17%	100%	%	25%	Inspektorat Daerah	APBD	
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	15	Doku men	1.436.387.835	6	Dokum en	794.919.726	2	Doku men	63.460.000	0	7.061.605			0	Doku men	7.061.605	0,00%	Doku men	11,13%	40%	Doku men	56%	Inspektorat Daerah	APBD	
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	~Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	15	Reko mend asi	565.877.134	8	Rekom endasi	112.978.700	3	Reko mend asi	56.436.400	0	5.647.465			0	Reko mend asi	5.647.465	0,00%	Reko mend asi	10,01%	53%	Reko mend asi	21%	Inspektorat Daerah	APBD	
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	~Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	9	Reko mend asi	870.510.701	20	Rekom endasi	681.941.026	3	Reko mend asi	7.023.600	0	1.414.140			0	Reko mend asi	1.414.140	0,00%	Reko mend asi	20,13%	100%	Reko mend asi	79%	Inspektorat Daerah	APBD	
		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Laporan Hasil Pendampingan dan Asistensi	20	Lapo ran	8.030.956.376	12	Lapora n	1.848.974.566	4	Lapor an	1.278.853.500	0	142.810.520			0	Lapor an	142.810.520	0,00%	Lapor an	11,17%	60%	Lapor an	25%	Inspektorat Daerah	APBD	
		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	30	Peran gkat Daerah	211.714.844	18	Perang kat Daerah	18.147.250	6	Peran gkat Daerah	15.302.100	0	826.320			0	Peran gkat Daerah	826.320	0,00%	Peran gkat Daerah	5,40%	60%	Peran gkat Daerah	9%	Inspektorat Daerah	APBD	
		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	675	Peran gkat Daerah	1.993.118.751	449	Perang kat Daerah	385.369.757	190	Peran gkat Daerah	292.500.000	0	13.264.480			0	Peran gkat Daerah	13.264.480	0,00%	Peran gkat Daerah	4,53%	67%	Peran gkat Daerah	20%	Inspektorat Daerah	APBD	
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	18	Kegia tan	4.415.187.521	12	Kegiat an	1.243.260.530	4	Kegiat an	821.051.400	2	120.278.696			2	Kegiat an	120.278.696	100,00%	Kegia tan	14,65%	78%	Kegiat an	31%	Inspektorat Daerah	APBD	
		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pemegakan Integritas	667	Peran gkat Daerah	1.410.935.260	384	Perang kat Daerah	202.197.029	165	Peran gkat Daerah	150.000.000	0	8.441.024			0	Peran gkat Daerah	8.441.024	0,00%	Peran gkat Daerah	5,63%	58%	Peran gkat Daerah	15%	Inspektorat Daerah	APBD	
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	84,5			83,97	Indeks		84	Indek s		83,97			83,97	Indeks		99,96%	Indek s		99%	Indek s					
	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan		Indeks Kepuasan Masyarakat	84,5			83,97	Indeks		84	Indek s		83,97			83,97	Indeks		99,96%	Indek s		99%	Indek s					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100	%	62.548.355.109	200	%	24.309.875.978	100	%	12.134.231.001	25	2.694.647.616			25,0	%	2.694.647.616	25,00%	%	22,21%	225%	%	43%	Inspektorat Daerah	APBD	

No	Tujuan / Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (kondisi akhir)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (%)			Unit OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana (APBD, DAK,TP,lainnya)
													I		II												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)			(7)			(8)		(9)		(12 = 8+9)			(13=12/7*100%)			(14=12/5 x100%)			(15)	(16)
				K	Satu an	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23	Doku men	517.206.474	17	Doku men	97.546.350	3	Doku men	29.106.200	3	9.344.553			3	Doku men	9.344.553	100,00%	Doku men	32,11%	87%	Doku men	21%	Inspektorat Daerah	APBD
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	89	Doku men	250.111.755	49	Dokum en	56.887.800	19	Doku men	23.378.100	4	6.991.745			4	Doku men	6.991.745	21,05%	Doku men	29,91%	60%	Doku men	26%	Inspektorat Daerah	APBD
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2	Doku men	66.210.474	2	Dokum en	3.086.350	0	Doku men	-	0	-			0	Doku men	0	0,00%	Doku men	0,00%	100%	Doku men	5%	Inspektorat Daerah	APBD
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	Doku men	14.258.806	2	Dokum en	2.346.550	0	Doku men	-	0	-			0	Doku men	0	0,00%	Doku men	0,00%	100%	Doku men	16%	Inspektorat Daerah	APBD
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	2	Doku men	21.135.226	2	Dokum en	2.596.350	0	Doku men	-	0	-			0	Doku men	0	0,00%	Doku men	0,00%	100%	Doku men	12%	Inspektorat Daerah	APBD
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	Doku men	16.231.231	2	Dokum en	2.346.550	0	Doku men	-	0	-			0	Doku men	0	0,00%	Doku men	0,00%	100%	Doku men	14%	Inspektorat Daerah	APBD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	80	Lapo ran	21.829.385	48	Lapora n	4.135.000	16	Lapor an	855.600	4	333.333			4	Lapor an	333.333	25,00%	Lapor an	38,96%	65%	Lapor an	20%	Inspektorat Daerah	APBD
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23	Lapo ran	127.429.597	14	Lapora n	26.147.750	2	Lapor an	4.872.500	3	2.019.475			3	Lapor an	2.019.475	150,00%	Lapor an	41,45%	74%	Lapor an	22%	Inspektorat Daerah	APBD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlayannya Adminstras iKeuangan Perangkat Daerah	100	%	45.595.743.173	100	%	17.870.253.144	100	%	9.831.785.739	25	2.539.497.839			50	%	2.539.497.839	50,00%	%	25,83%	100%	%	45%	Inspektorat Daerah	APBD
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	319	Oran g/bu lan	45.516.465.054	197	Orang/ bulan	17.854.272.044	67	Orang /bula n	9.826.667.739	62	2.537.552.089			65	Orang /bula n	2.537.552.089	100,00%	Oran g/bul an	25,82%	82%	Orang /bula n	45%	Inspektorat Daerah	APBD
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60	Doku men	39.389.210	36	Dokum en	8.254.300	12	Doku men	2.366.100	3	1.044.790			3	Doku men	1.044.790	25,00%	Doku men	44,16%	65%	Doku men	24%	Inspektorat Daerah	APBD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	30	Lapo ran	21.312.484	18	Lapora n	4.744.400	6	Lapor an	2.227.900	0	900.960			0	Lapor an	900.960	0,00%	Lapor an	40,44%	60%	Lapor an	26%	Inspektorat Daerah	APBD

No	Tujuan / Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (kondisi akhir)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (%)			Unit OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana (APBD, DAK,TP, lainnya)
													I		II												
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)			(7)			(8)		(9)		(12 = 8+9)			(13=12/7*100%)			
				K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	130	Laporan	18.576.424	78	Laporan	2.982.400	26	Laporan	524.000	6	-	6	Laporan	0	23,08%	Laporan	0,00%	65%	Laporan	16%	Inspektorat Daerah	APBD		
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlayannya Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	100	%	27.137.982	102	%	30.587.832	100	%	3.493.600	25	1.020.090	50	%	1.020.090	50,00%	%	29,20%	100%	%	116%	Inspektorat Daerah	APBD		
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	9	Dokumen	13.861.376	5	Dokumen	15.264.426	2	Dokumen	1.427.400	0	586.080	0	Dokumen	586.080	0,00%	Dokumen	41,06%	56%	Dokumen	114%	Inspektorat Daerah	APBD		
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9	Laporan	13.276.606	5	Laporan	15.323.406	2	Laporan	2.066.200	0	434.010	0	Laporan	434.010	0,00%	Laporan	21,01%	56%	Laporan	119%	Inspektorat Daerah	APBD		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlayannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	7.992.121.065	200	%	2.772.422.512	100	%	1.381.701.300	25	28.245.295	50	%	28.245.295	50,00%	%	2,04%	100%	%	35%	Inspektorat Daerah	APBD		
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	-	1	Paket	50.029.004	-	Paket	-	0	-	0	Paket	0	0,00%	Paket	0,00%	100%	Paket	100%	Inspektorat Daerah	APBD		
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	-	Dokumen	-	0	-	0	Dokumen	0	0,00%	Dokumen	0,00%	0%	Dokumen	0%	Inspektorat Daerah	APBD		
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5	Dokumen	755.368.154	3	Dokumen	174.261.802	1	Dokumen	82.962.200	0	1.639.470	0	Dokumen	1.639.470	0,00%	Dokumen	1,98%	60%	Dokumen	23%	Inspektorat Daerah	APBD		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	490	Dokumen	7.064.605.941	258	Dokumen	2.439.160.226	65	Dokumen	1.273.658.300	6	26.605.825	6	Dokumen	26.605.825	9,23%	Dokumen	2,09%	54%	Dokumen	35%	Inspektorat Daerah	APBD		
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	520	Orang	61.222.445	307	Orang	27.983.530	65	Orang	9.696.600	0	-	0	Orang	0	0,00%	Orang	0,00%	59%	Orang	46%	Inspektorat Daerah	APBD		
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	430	Orang	110.924.525	212	Orang	80.987.950	65	Orang	15.384.200	0	-	0	Orang	0	0,00%	Orang	0,00%	49%	Orang	73%	Inspektorat Daerah	APBD		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlayannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	1.958.595.406	200	%	557.649.630	1	%	289.635.900	25	50.006.144	50	%	50.006.144	5000,00%	%	17,27%	100%	%	31%	Inspektorat Daerah	APBD		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7	Paket	83.067.984	4	Paket	15.771.300	1	Paket	8.903.000	0	-	0	Paket	0	0,00%	Paket	0,00%	57%	Paket	19%	Inspektorat Daerah	APBD		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Paket	17.075.310	3	Paket	13.020.000	1	Paket	14.138.800	0	-	0	Paket	0	0,00%	Paket	0,00%	60%	Paket	76%	Inspektorat Daerah	APBD		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10	Paket	99.246.644	6	Paket	22.951.427	1	Paket	10.204.900	1	9.973.350	1	Paket	9.973.350	100,00%	Paket	97,73%	70%	Paket	33%	Inspektorat Daerah	APBD		

No	Tujuan / Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (kondisi akhir)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (%)			Unit OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana (APBD, DAK,TP,lainnya)
				(5)			(6)			(7)			(8)		(9)		(12 = 8+9)			(13=12/7*100%)			(14=12/5 x100%)				
				K	Satu an	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)																				(15)	(16)			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	58	Pake t	380.969.274	36	Paket	115.409.100	12	Paket	49.633.500	3	6.069.600			3	Paket	6.069.600	25,00%	Paket	12,23%	67%	Paket	32%	Inspektorat Daerah	APBD
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	30	Pake t	297.329.060	26	Paket	55.107.350	2	Paket	26.782.800	1	3.774.900			1	Paket	3.774.900	50,00%	Paket	14,09%	90%	Paket	20%	Inspektorat Daerah	APBD
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7	Doku men	15.772.236	5	Dokum en	4.116.000	2	Doku men	1.332.000	1	260.000			1	Doku men	260.000	50,00%	Doku men	19,52%	86%	Doku men	28%	Inspektorat Daerah	APBD
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5	Pake t	103.714.080	3	Paket	30.471.200	1	Paket	19.540.000	1	9.485.838			1	Paket	9.485.838	100,00%	Paket	48,55%	80%	Paket	39%	Inspektorat Daerah	APBD
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	Lapo ran	87.831.900	36	Lapora n	30.195.500	12	Lapor an	10.865.000	3	530.000			3	Lapor an	530.000	25,00%	Lapor an	4,88%	65%	Lapor an	35%	Inspektorat Daerah	APBD
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Lapo ran	745.143.169	36	Lapora n	231.167.303	12	Lapor an	108.291.500	3	17.595.331			3	Lapor an	17.595.331	25,00%	Lapor an	16,25%	65%	Lapor an	33%	Inspektorat Daerah	APBD
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	20	Doku men	107.009.949	12	Dokum en	34.201.450	4	Doku men	10.800.600	1	2.317.125			1	Doku men	2.317.125	25,00%	Doku men	21,45%	65%	Doku men	34%	Inspektorat Daerah	APBD
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10	Doku men	21.435.800	6	Dokum en	5.239.000	2	Doku men	29.143.800	0	-			0	Doku men	#VALUE!	0,00%	Doku men	0,00%	60%	Doku men	60%	Inspektorat Daerah	APBD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Diadakannya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan	14	Jenis	2.377.850.717	10	Jenis	1.959.086.484	3	Jenis	180.835.900	0	-			0	Jenis	0	0,00%	Jenis	0,00%	71%	Jenis	82%	Inspektorat Daerah	APBD
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	unit	-	1	unit	418.000.000	0	unit	-	0	-			0	unit	0	0,00%	unit	0,00%	100%	unit	100%	Inspektorat Daerah	APBD
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	unit	-	3	unit	919.500.000	0	unit	-	0	-			0	unit	0	0,00%	unit	0,00%	100%	unit	100%	Inspektorat Daerah	APBD
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	64	unit	-	65	unit	3.950.000	2	unit	4.638.000	0	-			0	unit	0	0,00%	unit	0,00%	0%	unit	0%	Inspektorat Daerah	APBD
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	165	unit	2.011.995.329	88	unit	440.742.137	12	unit	159.642.900	0	-			0	unit	0	0,00%	unit	0,00%	53%	unit	22%	Inspektorat Daerah	APBD
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	17	unit	365.855.388	13	unit	176.894.347	20	unit	16.555.000	0	-			0	unit	0	0,00%	unit	0,00%	100%	unit	48%	Inspektorat Daerah	APBD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15	Lapo ran	932.159.182	8	Lapora n	285.444.043	3	Lapor an	159.667.362	3	36.694.346			3	Lapor an	36.694.346	100,00%	Lapor an	22,98%	73%	Lapor an	35%	Inspektorat Daerah	APBD
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	Lapo ran	3.616.650	36	Lapora n	269.000	12	Lapor an	650.000	3	62.500			3	Lapor an	62.500	100,00%	Lapor an	9,62%	65%	Lapor an	9%	Inspektorat Daerah	APBD
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Lapo ran	586.305.000	36	Lapora n	189.954.815	12	Lapor an	111.005.362	3	24.614.326			3	Lapor an	24.614.326	25,00%	Lapor an	22,17%	65%	Lapor an	37%	Inspektorat Daerah	APBD

No	Tujuan / Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (kondisi akhir)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (%)			Unit OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana (APBD, DAK,TP,lainnya)		
													I		II												
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)			(7)				(8)		(9)		(12 = 8+9)				(13=12/7*100%)	
				K	Satu an	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satua n	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Satua n	Rp	K	Satua n	Rp	K	Satua n	Rp		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	Lapo ran	342.237.532	36	Lapora n	95.220.228	12	Lapor an	48.012.000	3	12.017.520			3	Lapor an	12.017.520	25,00%	Lapor an	25,03%	65%	Lapor an	31%	Inspektorat Daerah	APBD
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27	Jenis	3.147.541.110	11	Jenis	760.791.765	5	Jenis	258.005.000	5	29.839.349			5	Jenis	29.839.349	100,00%	Jenis	11,57%	59%	Jenis	25%	Inspektorat Daerah	APBD
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	Unit	58.829.989	3	Unit	38.191.066	1	Unit	43.960.000	1	3.867.750			1	Unit	3.867.750	100,00%	Unit	8,80%	100%	Unit	71%	Inspektorat Daerah	APBD
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29	Unit	383.450.602	27	Unit	114.209.288	6	Unit	97.520.000	5	7.290.599			5	Unit	7.290.599	83,33%	Unit	7,48%	110%	Unit	32%	Inspektorat Daerah	APBD
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20	Unit	113.948.200	20	Unit	2.100.000	0	Unit	-	0	-			0	Unit	0	#DIV/0!	Unit	#DIV/0!	100%	Unit	2%	Inspektorat Daerah	APBD
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	395	Unit	364.107.620	224	Unit	91.371.000	68	Unit	48.400.000	16	5.130.000			16	Unit	5.130.000	23,53%	Unit	10,60%	61%	Unit	27%	Inspektorat Daerah	APBD
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	2.110.972.955	3	Unit	479.139.411	1	Unit	49.955.000	1	9.907.000			1	Unit	9.907.000	100,00%	Unit	19,83%	80%	Unit	23%	Inspektorat Daerah	APBD
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	124	Unit	116.231.744	75	Unit	35.781.000	19	Unit	18.170.000	5	3.644.000			5	Unit	3.644.000	26,32%	Unit	20,06%	65%	Unit	34%	Inspektorat Daerah	APBD

1

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 70 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo, Inspektorat Daerah mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat Daerah serta pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun dalam melaksanakan tugas sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. Pelaksanaan pendampingan dan asistensi di bidang pengawasan;
8. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo telah menetapkan tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2021-2026 dengan mengacu pada tugas pokok yang dimiliki, adapun tujuan yang ditetapkan yaitu **"Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Birokrasi yang Bersih melalui Pengawasan Internal yang Berkualitas"** dan **"Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik"** sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah Terwujudnya Peningkatan Sistem Pengendalian Intern dan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik. Dari tujuan dan sasaran tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo menetapkan indikator kinerja yang telah sesuai kaidah penentuan indikator yang jelas, terukur, relevan dengan

tujuan dan sasaran yang ditetapkan, dan dapat dicapai dalam waktu yang telah ditentukan.

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Inspektorat Daerah akan dicapai melalui 2 (dua) program yang berhubungan dengan tugas pokok Inspektorat dan 1 (satu) program penunjang, yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan, dengan indikator :
 - Persentase penyelenggaraan pengawasan internal;
Sampai dengan triwulan I dari target 20,54%, kinerja kegiatan pengawasan internal telah terealisasi sebesar 37,73%.
 - Persentase penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu
Sampai dengan triwulan I dari target 12,3%, kinerja kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu telah terealisasi sebesar 22,95%.
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi, dengan indikator :
 - Persentase hasil perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan.
Sampai dengan triwulan I target dari 36,2%, kinerja perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan telah terealisasi sebesar 52,45%.
 - Persentase hasil pendampingan dan asistensi
Sampai dengan triwulan I dari target 22,39%, kinerja kegiatan pendampingan dan asistensi telah terealisasi sebesar 38,42%.
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator :
 - Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Sampai dengan triwulan I dari target 1,82%, kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota telah terealisasi sebesar 24,15%.

Berdasarkan hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo menunjukkan terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan tidak optimalnya pencapaian realisasi target kinerja Inspektorat Daerah s/d Triwulan I Tahun 2025. Permasalahan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan triwulan I dapat dilihat dalam tabel 2.2. berikut:

Tabel 2.2
Permasalahan dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan
sampai dengan Triwulan I

No	Program/ Kegiatan	Permasalahan
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Adanya mandatory penugasan yang terbatas waktu dan prioritas akan tetapi belum masuk dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berakibat mundurnya jadwal penugasan lain yang sudah tersusun.
2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Adanya mandatory pengawasan tujuan tertentu yang belum masuk didalam PKPT murni dan harus dilaksanakan, kegiatan audit investigasi dan PKKN dilaksanakan berdasar pengaduan masyarakat dan permintaan APH yang masuk.
II	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan kebijakan menyesuaikan dengan jadwal penyusunan dan menunggu terbitnya peraturan /pedoman dari pusat.
2	Pendampingan dan Asistensi	Peraturan/Pedoman pelaksanaan kegiatan baru terbit di awal tahun dan terdapat perubahan desain/metode penilaian kegiatan untuk beberapa kegiatan.
III	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Agenda penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah pada tahun 2025 sangat banyak.
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Adanya kekurangan kebutuhan anggaran pembayaran PPH gaji pegawai sampai akhir tahun akibat adanya peraturan baru.

No	Program/ Kegiatan	Permasalahan
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan kebutuhan dan penatausahaan Barang Milik Daerah tidak dilaksanakan tepat waktu
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengiriman/pendaftaran peserta diklat belum dapat dilaksanakan menunggu kepastian penyelenggaraan diklat dari pihak penyelenggara.
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Aktifitas kegiatan rapat koordinasi dan fasilitasi tamu dilaksanakan sesuai kebutuhan rakor, konsultasi, undangan koordinasi dan kedatangan tamu.
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Adanya efisiensi anggaran belanja modal barang jasa untuk beberapa pengadaan barang.
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Adanya kenaikan kebutuhan anggaran pembayaran listrik sampai dengan bulan Desember
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan barang milik daerah menyesuaikan kondisi barang.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Inspektorat Daerah merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah serta pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai kebijakan Bupati. Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Daerah bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, Inspektorat Daerah merupakan unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan susunan organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo terdiri atas Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Hal yang sangat penting dalam menjalankan fungsinya terkait pelayanan adalah mempertahankan dan meningkatkan kinerja Inspektorat Daerah yang diukur dengan pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan yaitu "**Tingkat Maturitas SPIP** dengan target yang ditetapkan. Tingkat maturitas SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya meliputi :

1. Keterbatasan jumlah Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk melaksanakan pengawasan, pendampingan dan asistensi.
2. Belum meratanya standar kompetensi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam pemeriksaan;
3. Penerapan dan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang belum optimal di lingkungan pemerintah daerah.
4. Penerapan Manajemen Risiko belum dijalankan dengan maksimal;
5. Belum optimalnya fungsi *consulting* Inspektorat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten/ Kota
6. Kendali Mutu belum dijalankan sepenuhnya dalam penyelenggaraan pengawasan pemerintahan di Kabupaten/ Kota
7. Pembangunan Budaya Integritas belum menjadi suatu kebutuhan utama

Dari permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo tentunya akan berdampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah apabila tidak diatasi secara cepat dan tepat. Pencapaian Target Misi ke 4 yaitu Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) akan menjadi tidak optimal, dimana salah satu indikator sasaran yang harus dicapai adalah Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel. Inspektorat Kabupaten Purworejo sebagai pelaksana unsur pengawasan mempunyai fungsi dan bertanggung jawab atas capaian nilai

Maturitas SPIP minimal level 3 dengan target pada tahun 2025 sebesar 3,325 dan mencapai nilai 3,50 pada tahun 2026.

Secara umum terdapat beberapa peluang yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo, yaitu:

1. Penguatan Peran Inspektorat Daerah yang diamanatkan oleh Peraturan perundang-undangan.
2. Dukungan penganggaran dari pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo sesuai kondisi kemampuan keuangan daerah.
3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
4. Perkembangan paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari tata kelola pemerintahan yang tertutup, tidak partisipatif, dan dominan menjadi tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
5. Penguatan Kompetensi dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia melalui pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis.
6. Penguatan Sarana prasarana pendukung kinerja pelaksanaan pengawasan.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari dokumen lainnya, maka isu-isu strategis yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo, sebagai berikut:

1. Penguatan Peran Inspektorat Daerah yang diamanatkan oleh Peraturan perundang-undangan.
2. Peningkatan Kapasitas dan kualitas fungsional pengawasan (Auditor dan PPUPD) dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Optimalisasi koordinasi fungsi pembinaan, pendampingan dan asistensi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai upaya pencapaian target pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah
4. Penerapan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko belum maksimal dilaksanakan oleh perangkat daerah.
5. Meningkatnya partisipasi pengawasan masyarakat dan tuntutan pelayanan publik atas pengaduan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan yang dilakukan.

6. Peningkatan kualitas pengawasan melalui penerapan Kendali Mutu Pengawasan sesuai pedoman yang berlaku.
7. Pembangunan Budaya Integritas dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025 berpedoman pada program dan kegiatan yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2022, yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Program dan kegiatan meliputi :

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan, dengan indikator :
 - Persentase penyelenggaraan pengawasan internal (target 100%);
 - Persentase penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu (target 100%)
 2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi, dengan indikator :
 - Persentase hasil perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan (target 100%).
 - Persentase hasil pendampingan dan asistensi (target 100%).
 3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator :
 - Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten (target 100%)
- 3.1.1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Perumusan program dan kegiatan didalam rencana kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo didasarkan pada pencapaian visi misi Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026, adapun Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo mendukung misi 4 yaitu meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).

3.1.2. Uraian Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah

Kegiatan/Sub Kegiatan:

- a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;
 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - Reviu Laporan Kinerja;
 - Reviu Laporan Keuangan;
 - Pengawasan Desa;
 - Kerjasama Pengawasan Internal;
 - Monitoring dan Eavaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP;
- b. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu;
 - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah;
 - Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.
- c. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan;
 - Perumusan Kabijakan Teknis di Bidang Pengawasan;
 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan;
- d. Pendampingan dan Asistensi;
 - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah;
 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
 - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 - Pendampingan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.
- e. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- f. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD;
- g. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD;
- h. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;
- i. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - Penyediaan Bahan/Material;
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD;
- j. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - Pengadaan Mebel;
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- k. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;

1. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;

3.1.3. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Mendukung Pengarusutamaan Gender.

Dalam rangka pengarusutamaan gender di Kabupaten Purworejo, terdapat sub kegiatan pada Inspektorat daerah yang diarahkan untuk mendukung pengarusutamaan gender yaitu :

1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Subkegiatan pengawasan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah mendukung pengarusutamaan gender melalui pelaksanaan Evaluasi Perencanaan Berbasis Gender. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan kegiatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Pemerintah kabupaten Purworejo. Ruang lingkup evaluasi meliputi Perencanaan Anggaran Responsif Gender (ARG) pada Perangkat Daerah sejak disusunnya rencana strategis, rencana kerja, program dan kegiatan. Melalui evaluasi perencanaan berbasis gender diharapkan pengarusutamaan gender di kabupaten Purworejo dapat berjalan efektif dan sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku

2. Pendampingan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Subkegiatan Pendampingan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas mendukung pengarusutamaan gender melalui kegiatan sosialisasi pencegahan dan pengendalian korupsi dan gratifikasi yang dilaksanakan oleh Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG). Sosialisasi yang dilakukan oleh UPG bertujuan untuk membangun dan meningkatkan integritas dalam upaya pencegahan dan pengendalian korupsi. Pelaksanaan sosialisasi melibatkan keterwakilan Perempuan

baik dari peserta maupun tim sosialisasi (Penyuluh Anti Korupsi). Adanya keterwakilan peserta perempuan dalam pelaksanaan diharapkan dapat lebih meningkatkan pemahaman bahaya korupsi dan gratifikasi serta pencegahannya ke masyarakat sejak dari lingkup terkecil yaitu keluarga. Melalui kegiatan ini diharapkan Indeks Integritas Kabupaten Purworejo dapat meningkat.

3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi mendukung pengarusutamaan gender dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua pegawai Inspektorat Daerah untuk meningkatkan kompetensi yang dimiliki baik teknis maupun non teknis. Untuk meningkatkan kesetaraan kompetensi, Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo mengirimkan semua pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan. Pemilihan jenis pelatihan dan pendidikan dilakukan sesuai gap kompetensi dan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi. Semua pegawai mendapatkan kesempatan yang sama mengikuti untuk mengikuti 1 kali pendidikan pelatihan. Melalui kegiatan ini diharapkan fungsional dan pelaksana memiliki kompetensi dan kapabilitas yang unggul dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di Inspektorat Daerah.

3.1.4. Program/Kegiatan yang mengalami perubahan indikator dan targetnya

Berdasarkan hasil analisis kinerja dan evaluasi pelaksanaan Triwulan I sesuai perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan perkiraan awal serta keperluan mendesak lainnya mengakibatkan perlu dilakukannya penyesuaian pagu anggaran, penghapusan kegiatan/ sub kegiatan, penyesuaian indikator dan target. Adapun Penjelasan program/ kegiatan yang mengalami perubahan penyesuaian indikator dan target dapat dilihat dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1 Penyesuaian Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Hasil Kegiatan
Inspektorat Kabupaten Purworejo

Kode						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan		Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Jenis Keg.
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	a/b/c
6	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten	100 %	100 %	a
6	01	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	a
6	01	01	2	01	00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19 Dokumen	19 Dokumen	a
6	01	01	2	01	00 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	16 Laporan	a
6	01	01	2	01	00 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	5 Laporan	a

Kode						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan		Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Jenis Keg.
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	a/b/c
6	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	a
6	01	01	2	02	00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	67 Orang/bulan	64 Orang/bulan	a
6	01	01	2	02	00 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	a
6	01	01	2	02	00 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	6 Laporan	a
6	01	01	2	02	00 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	26 Laporan	26 Laporan	a
6	01	01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	a

Kode						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan		Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Jenis Keg.
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	a/b/c
6	01	01	2	03	00 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	a
6	01	01	2	03	00 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	a
6	01	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	a
6	01	01	2	05	00 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	a
6	01	01	2	05	00 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	65 Orang	63 Orang	a
6	01	01	2	05	00 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	65 Orang	63 Orang	a
6	01	01	2	05	00 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	65 Orang	0 Orang	a

Kode						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan		Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Jenis Keg.
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	a/b/c
6	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	a
6	01	01	2	06	00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	a
6	01	01	2	06	00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0 Paket	a
6	01	01	2	06	00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	a
6	01	01	2	06	00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	a
6	01	01	2	06	00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	a
6	01	01	2	06	00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	1 Dokumen	a

Kode						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan		Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Jenis Keg.
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	a/b/c
6	01	01	2	06	00 07	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	a
6	01	01	2	06	00 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	a
6	01	01	2	06	00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	a
6	01	01	2	06	00 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	a
6	01	01	2	06	00 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	a
6	01	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan	2 Jenis	3 Jenis	a
6	01	01	2	07	00 05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	a

Kode						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Hasil Kegiatan / Keluaran Sub Kegiatan		Target Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Jenis Keg.
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	a/b/c
6	01	01	2	07	00 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	0 Unit	a
6	01	01	2	07	00 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	2 Unit	a
6	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah yang Disediakan	Jasa Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	a
6	01	01	2	08	00 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	a
6	01	01	2	08	00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	a
6	01	01	2	08	00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	a
6	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	5 Jenis	5 Jenis	a

Kode						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan		Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Jenis Keg.
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	a/b/c
6	01	01	2	09	00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	a
6	01	01	2	09	00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	4 Unit	a
6	01	01	2	09	00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	68 Unit	68 Unit	a
6	01	01	2	09	00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	a
6	01	01	2	09	00 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	19 Unit	24 Unit	a
6	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase penyelenggaraan pengawasan internal	Persentase penyelenggaraan pengawasan internal	100 %	100 %	a

Kode						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan		Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Jenis Keg.
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	a/b/c
6	01	02	2	01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen Hasil penyelenggaraan pengawasan internal	Jumlah Dokumen Hasil penyelenggaraan pengawasan internal	7 Dokumen	7 Dokumen	a
6	01	02	2	01	00 01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	74 Laporan	50 Laporan	a
6	01	02	2	01	00 02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	96 Laporan	109 Laporan	a
6	01	02	2	01	00 03	Reviu Laporan Kinerja	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1 Laporan	1 Laporan	a
6	01	02	2	01	00 04	Reviu Laporan Keuangan	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	30 Laporan	28 Laporan	a
6	01	02	2	01	00 05	Pengawasan Desa	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	98 Laporan	29 Laporan	a
6	01	02	2	01	00 06	Kerja Sama Pengawasan Internal	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	2 Kesepakatan	1 Kesepakatan	a

Kode						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan		Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Jenis Keg.
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	a/b/c
6	01	02	2	01	00 07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	6 Dokumen	6 Dokumen	a
6	01	02	2	02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah penyenggara laporan raanpengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah penyenggara laporan raanpengawasan dengan tujuan tertentu	2 Laporan	2 Laporan	a
6	01	02	2	02	00 01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	10 Laporan	2 Laporan	a
6	01	02	2	02	00 02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	121 Laporan	111 Laporan	a
6	01	03				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Daerah	Persentase Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Daerah	100 %	100 %	a
6	01	03	2	01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	2 Dokumen	2 Dokumen	a
6	01	03	2	01	00 01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	a

Kode						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan		Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Jenis Keg.
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	a/b/c
6	01	03	2	01	00 02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	3 Rekomen dasi	2 Rekomen dasi	a
6	01	03	2	02		Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Laporan Hasil Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Laporan Hasil Pendampingan dan Asistensi	4 Laporan	4 Laporan	a
6	01	03	2	02	00 01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	6 perangkat daerah	6 perangkat daerah	a
6	01	03	2	02	00 02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	190 perangkat daerah	168 perangkat daerah	a
6	01	03	2	02	00 03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	3 Kegiatan	a
6	01	03	2	02	00 04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	156 perangkat daerah	165 perangkat daerah	a

Untuk perubahan pagu pendanaan program, kegiatan dan subkegiatan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2 PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
INSPEKTORAT DAERAH KAB. PURWOREJO
TAHUN 2025

**PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
INSPEKTORAT DAERAH KAB. PURWOREJO
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE REVISI OPD	REALISASI CAPAIAN REVISI OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET REVISI OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	NASIONAL	DAERAH			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)				
							SEBELUM	SEBUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		INSPEKTORAT DAERAH							16.001.051.401,00	16.173.893.777,00	12.820.898.847,00	-2.180.062.554,00							16.019.038.993,00			
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							16.001.051.401,00	16.173.893.777,00	12.820.898.847,00	-2.180.062.554,00							16.019.038.993,00			
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH							16.001.051.401,00	16.173.893.777,00	12.820.898.847,00	-2.180.062.554,00							16.019.038.993,00			
1.	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten				100 %	100 %	12.134.231.001,00	12.307.173.377,00	11.444.198.647,00	718.890.962,00							12.862.121.863,00			
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	29.106.200,00	29.106.200,00	19.524.900,00	-9.581.300,00			-	5. Peninjauan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan 5. Peninjauan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan	Aparatur, Masyarakat Kab Purworejo		38.678.200,00	INSPEKTORAT DAERAH		
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				19 Dokumen	19 Dokumen	23.378.100,00	23.378.100,00	16.692.700,00	-6.685.400,00	Kab. Purworejo, Semua Kacamatan, Semua Kal/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peninjauan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan 5. Peninjauan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan			27.858.490,00	INSPEKTORAT DAERAH		
	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD																				
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD				16 Laporan	16 Laporan	855.800,00	855.600,00	365.400,00	-490.200,00	Kab. Purworejo, Semua Kacamatan, Semua Kal/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peninjauan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan 5. Peninjauan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan			1.981.960,00	INSPEKTORAT DAERAH		
	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	5 Laporan	4.872.500,00	4.872.500,00	2.436.800,00	-2.435.700,00	Kab. Purworejo, Semua Kacamatan, Semua Kal/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peninjauan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan 5. Peninjauan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan			8.867.750,00	INSPEKTORAT DAERAH		
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	9.831.785.739,00	9.862.817.115,00	9.934.892.785,00	103.107.046,00			-	5. Peninjauan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan 5. Peninjauan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan	Aparatur, Masyarakat Kab Purworejo		10.310.083.063,00	INSPEKTORAT DAERAH		
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																				
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				67 Orang/bulan	64 Orang/bulan	9.826.867.739,00	9.857.898.115,00	9.931.704.285,00	105.036.548,00	Kab. Purworejo, Semua Kacamatan, Semua Kal/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBLAKUHAN PENGGAJIAN PEGAJIAN PEMERINTAH DEKATAN KERJA	-	5. Peninjauan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan 5. Peninjauan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan			10.287.127.808,00	INSPEKTORAT DAERAH		
	6.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																				
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	2.366.100,00	2.366.100,00	1.405.400,00	-960.700,00	Kab. Purworejo, Semua Kacamatan, Semua Kal/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peninjauan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan 5. Peninjauan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan			5.968.785,00	INSPEKTORAT DAERAH		
	6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																				
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				6 Laporan	6 Laporan	2.227.900,00	2.227.900,00	1.521.100,00	-706.800,00	Kab. Purworejo, Semua Kacamatan, Semua Kal/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peninjauan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan 5. Peninjauan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan			4.430.890,00	INSPEKTORAT DAERAH		
	6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD																				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE REINSTR OPD	REALISASI CAPAIAN REINSTR OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET REINSTR OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD				26 Laporan	26 Laporan	524.000,00	524.000,00	262.000,00	-262.000,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan 5. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan			2.596.400,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.03	Administrasi Berang Misk Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Berang Misk Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah				100 %	100 %	3.493.600,00	3.493.600,00	2.232.800,00	-1.260.800,00			-	5. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan 5. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan	Aparatur, Masyarakat Kab Purworejo		5.162.990,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Berang Misk Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Berang Misk Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.427.400,00	1.427.400,00	701.800,00	-725.600,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan 5. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan			2.230.140,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Berang Misk Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Berang Misk Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.066.200,00	2.066.200,00	1.531.200,00	-535.000,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan 5. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan			2.932.820,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepagawain Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepagawain Perangkat Daerah				100 %	100 %	1.381.701.300,00	1.381.701.300,00	679.991.400,00	-701.709.900,00			-	5. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan 5. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan	Aparatur, Masyarakat Kab Purworejo		1.515.425.285,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	62.962.200,00	62.962.200,00	12.205.000,00	-70.757.200,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan 5. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan			87.627.850,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0008	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				65 Orang	65 Orang	1.273.658.300,00	1.273.658.300,00	664.968.400,00	-608.691.900,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan 5. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan			1.400.208.280,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				65 Orang	65 Orang	9.896.600,00	9.896.600,00	2.820.000,00	-6.876.600,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan 5. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan			10.866.425,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				65 Orang	0 Orang	15.384.200,00	15.384.200,00	0,00	-15.384.200,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan 5. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan			16.922.950,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE REINSTRUKSI OPD	REALISASI CAPAIAN REINSTRUKSI OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET REINSTRUKSI OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	289.635.900,00	289.635.900,00	192.791.600,00	-96.844.300,00			-	5. Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan 5. Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan	Agensi, Masyarak Kab Purworejo		355.442.285,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.903.000,00	8.903.000,00	2.336.500,00	-6.566.500,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan 5. Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan		9.797.580,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	14.138.800,00	14.138.800,00	0,00	-14.138.800,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan 5. Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan		15.984.120,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.204.900,00	10.204.800,00	10.202.500,00	-2.400,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan 5. Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan		11.510.015,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	49.633.500,00	49.633.500,00	49.633.500,00	0,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan 5. Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan		54.598.180,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	26.782.800,00	26.782.800,00	24.186.800,00	-2.596.000,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan 5. Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan		33.917.400,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	1 Dokumen	1.332.000,00	1.332.000,00	1.332.000,00	0,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan 5. Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan		3.075.800,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	19.540.000,00	19.540.000,00	9.798.000,00	-9.742.000,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan 5. Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan		21.484.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	10.885.000,00	10.885.000,00	8.215.000,00	-2.670.000,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan 5. Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan		11.951.500,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.06.0009	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE REINSTRATRA OPO	REALISASI CAPAIAN REINSTRATRA OPO TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET REINSTRATRA OPO TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEDUDAH	RPKD 2024	APBD 2024	RPKD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	108.291.500,00	108.291.500,00	77.838.800,00	-30.454.900,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan 5. Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan			142.440.750,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.06.0010		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	10.800.800,00	10.800.800,00	6.810.700,00	-3.989.900,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan 5. Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan			19.033.960,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.06.0011		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	29.143.800,00	29.143.800,00	2.470.000,00	-26.673.800,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan 5. Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan			32.058.180,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Didatangkan				3 Jenis	2 Jenis	180.835.900,00	180.835.900,00	35.630.600,00	-145.205.300,00			-	5. Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan 5. Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan	Aparatur, Masyarakat Kab Purworejo		196.062.590,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Didatangkan				2 Unit	2 Unit	4.638.000,00	4.638.000,00	4.078.600,00	-559.400,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan 5. Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan			5.101.800,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.07.0008		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Didatangkan				12 Unit	0 Unit	159.642.900,00	159.642.900,00	0,00	-159.642.900,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan 5. Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan			175.607.190,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.07.0010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Didatangkan				20 Unit	2 Unit	16.555.000,00	16.555.000,00	31.552.000,00	14.967.000,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan 5. Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan			17.353.600,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3 Laporan	3 Laporan	159.667.362,00	159.667.362,00	189.659.562,00	29.992.200,00			-	5. Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan 5. Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan	Aparatur, Masyarakat Kab Purworejo		163.529.080,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	650.000,00	650.000,00	300.000,00	-350.000,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan 5. Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan			715.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE REINTRA OPO	REALISASI CAPAIAN REINTRA OPO TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET REINTRA OPO TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunitas, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	111.005.362,00	111.005.362,00	141.247.562,00	30.242.200,00	Kab. Purworejo, Semua Kacamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan 5. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan			110.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	48.012.000,00	48.012.000,00	48.112.000,00	100.000,00	Kab. Purworejo, Semua Kacamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan 5. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan			52.814.080,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara				5 Jenis	5 Jenis	258.005.000,00	399.916.000,00	399.475.000,00	131.470.000,00			-	5. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan 5. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan	Aparatur, Masyarakat Kab Purworejo		296.737.900,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pagainya				1 Unit	1 Unit	43.960.000,00	43.960.000,00	39.950.000,00	-4.010.000,00	Kab. Purworejo, Semua Kacamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan 5. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan			43.945.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perlindungan Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perlindungannya				6 Unit	4 Unit	97.520.000,00	97.520.000,00	77.680.000,00	-19.860.000,00	Kab. Purworejo, Semua Kacamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan 5. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan			94.116.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				68 Unit	68 Unit	48.400.000,00	48.400.000,00	48.400.000,00	0,00	Kab. Purworejo, Semua Kacamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan 5. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan			53.242.200,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	49.955.000,00	191.866.000,00	202.245.000,00	152.280.000,00	Kab. Purworejo, Semua Kacamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan 5. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan			55.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				19 Unit	24 Unit	18.170.000,00	18.170.000,00	21.220.000,00	3.050.000,00	Kab. Purworejo, Semua Kacamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan 5. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan			20.434.700,00	INSPEKTORAT DAERAH
2.	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGEWASAN	Persentase Penyeleenggaraan Pengawasan Internal				100 %	100 %	1.824.606.900,00	1.824.606.900,00	648.684.400,00	162.450.980,00							1.676.957.880,00	
	6.01.02.2.01	Penyeleenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen Hasil Penyeleenggaraan Pengawasan Internal				7 Dokumen	7 Dokumen	1.214.092.500,00	1.214.092.500,00	437.040.700,00	-777.051.800,00			-	5. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan 5. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan	Aparatur, Masyarakat Kab Purworejo		1.335.502.025,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE REINSTRUKSI OPD	REALISASI CAPAIAN REVISI OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET REVISI OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Berlambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				74 Laporan	50 Laporan	148.334.000,00	148.334.000,00	70.704.800,00	-75.629.200,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan 5. Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan		180.987.400,00	INSPEKTORAT DAERAH	
6.01.02.2.01.0002		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				96 Laporan	109 Laporan	109.746.700,00	109.746.700,00	72.792.700,00	-36.954.000,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan 5. Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan		120.721.645,00	INSPEKTORAT DAERAH	
6.01.02.2.01.0003		Revisi Laporan Kinerja																		
			Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Kinerja				1 Laporan	1 Laporan	17.711.400,00	17.711.400,00	5.336.000,00	-12.378.400,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan 5. Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan		19.482.540,00	INSPEKTORAT DAERAH	
6.01.02.2.01.0004		Revisi Laporan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan				30 Laporan	28 Laporan	100.300.400,00	100.300.400,00	32.944.400,00	-67.356.000,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan 5. Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan		110.330.440,00	INSPEKTORAT DAERAH	
6.01.02.2.01.0005		Pengawasan Desa																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				98 Laporan	29 Laporan	250.000.000,00	250.000.000,00	79.044.200,00	-170.955.800,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan 5. Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan		275.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
6.01.02.2.01.0006		Kerja Sama Pengawasan Internal																		
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				2 Kesepaka- tan	1 Kesepaka- tan	30.000.000,00	30.000.000,00	9.387.900,00	-20.612.100,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan 5. Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan		33.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
6.01.02.2.01.0007		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP																		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP				6 Dokumen	6 Dokumen	580.000.000,00	580.000.000,00	186.821.700,00	-393.178.300,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan 5. Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan		616.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
6.01.02.2.02		Penyenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				2 Laporan	2 Laporan	310.414.400,00	310.414.400,00	211.843.700,00	-98.570.700,00			-	5. Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan 5. Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan	Agatur, Masyarakat Kab Purworejo	341.455.855,00	INSPEKTORAT DAERAH	
6.01.02.2.02.0001		Penanganan Penyelesaian Keuangan Negara/Desa																		
			Jumlah Laporan Penyelesaian Keuangan Negara/Desa yang Ditangani				10 Laporan	2 Laporan	70.000.000,00	70.000.000,00	31.912.900,00	-38.087.100,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan 5. Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan		77.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
6.01.02.2.02.0002		Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENTAN OPD	REALISASI CAPAIAN RENTAN TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Berlambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pengecekan Dengan Tujuan Tertentu				121 Laporan	111 Laporan	240.414.400,00	240.414.400,00	179.730.800,00	-60.683.600,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan 5. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan			264.455.855,00	INSPEKTORAT DAERAH
3.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengecekan dan Bidang Fasilitasi Pengecekan				100 %	100 %	1.342.313.800,00	1.342.313.800,00	728.105.890,00	147.448.880,00							1.489.758.160,00	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengecekan dan Fasilitasi Pengecekan	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengecekan dan Fasilitasi Pengecekan				2 Dokumen	2 Dokumen	63.460.000,00	63.460.000,00	12.872.800,00	-50.787.200,00			-	5. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan 5. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan	Aparatur, Masyarakat Kab Purworejo		74.770.300,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengecekan																		
			Jumlah Rekomendasi/ Kebijakan Teknis di Bidang Pengecekan yang Disusun				3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	56.436.400,00	56.436.400,00	10.512.800,00	-45.923.600,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan 5. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan			82.344.040,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengecekan																		
			Jumlah Rekomendasi/ Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengecekan yang Disusun				3 Rekomendasi	2 Rekomendasi	7.023.800,00	7.023.800,00	2.160.000,00	-4.863.800,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan 5. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan			12.426.260,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Laporan Hasil Pendampingan dan Asistensi				4 Laporan	4 Laporan	1.278.853.500,00	1.278.853.500,00	715.433.000,00	-563.420.500,00			-	-	Aparatur, Masyarakat Kab Purworejo		1.414.988.850,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah														-				
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi/ Urusan Pemerintahan Daerah				6 perangkat daerah	6 perangkat daerah	15.302.100,00	15.302.100,00	6.319.800,00	-8.982.300,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			16.832.310,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				190 perangkat daerah	166 perangkat daerah	292.500.000,00	292.500.000,00	116.351.000,00	-176.149.000,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan 5. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan			330.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Penegakan dan Pemberantasan Korupsi																		
			Jumlah Kegiatan Koordinasi/ Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Penegakan dan Pemberantasan Korupsi				4 Kegiatan	3 Kegiatan	821.051.400,00	821.051.400,00	545.249.800,00	-275.801.600,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan 5. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan			903.156.540,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi/ dan Verifikasi Penegakan Integritas				156 perangkat daerah	165 perangkat daerah	150.000.000,00	150.000.000,00	47.512.400,00	-102.487.600,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan 5. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan			165.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
			J U M L A H						18.901.861.491,00	16.173.993.777,00	12.820.888.847,00	-2.180.062.644,00							16.019.938.993,00	

Pada Tabel 3.2 diatas yang merupakan tabel rencana kerja hasil input dari Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) hanya mencantumkan capaian program, hasil/sasaran kegiatan dan keluaran sub kegiatan, sedangkan Sasaran Program, Keluaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan dapat dilihat dalam tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3
SASARAN PROGRAM, KELUARAN KEGIATAN, DAN SASARAN SUB KEGIATAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN/SASARAN SUB KEGIATAN
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
i	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN/SASARAN SUB KEGIATAN
iii	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
iv	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
v	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
10	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
vi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN/SASARAN SUB KEGIATAN
1	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
vii	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
viii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara pada tahun tertentu
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan
i	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Tersusunnya laporan, kesepakatan, dokumen hasil

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN/SASARAN SUB KEGIATAN
		penyelenggaraan pengawasan internal
1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
3	Reviu Laporan Kinerja	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja
4	Reviu Laporan Keuangan	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan
5	Pengawasan Desa	Terlaksananya Pengawasan Desa
6	Kerja Sama Pengawasan Internal	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal
7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
ii	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Tersusunnya Laporan hasil penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu
1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Terlaksananya Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi
i	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Tersusunnya rekomendasi hasil penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
ii	Pendampingan dan Asistensi	Terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi dan jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi
1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN/SASARAN SUB KEGIATAN
2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

BAB IV

P E N U T U P

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun sebagai penyempurnaan Renja yang telah mengakomodir kebutuhan-kebutuhan yang belum terencana sebelumnya. Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo. Perubahan Rencana kerja ini memberikan gambaran mengenai program, kegiatan, sasaran, indikator-indikator kinerja dan target yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

4.1. Catatan Penting.

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan yang terkait dengan Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 yaitu :

1. Sesuai tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tertuang dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan yang disusun pada awal tahun belum dapat maksimal dikarenakan adanya penugasan-penugasan mandatori prioritas yang harus dilaksanakan.
2. Adanya penyesuaian desain aktifitas kegiatan yang harus menyesuaikan pedoman pelaksanaan yang baru.
3. Penyesuaian pagu program dan kegiatan akibat adanya perubahan-perubahan tersebut diatas dilakukan dengan rekomposisi dan efisiensi pagu anggaran tahun berjalan.

4.2. Kaidah-Kaidah

Kaidah-kaidah dalam penyusunan Perubahan Renja PD Tahun 2025, Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo meliputi :

1. Memperhatikan Evaluasi capaian kinerja triwulan I tahun berjalan.
2. Memperhatikan kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi dan belum terakomodir dalam Renja Tahun 2025.
3. Tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
4. Isu-isu strategis yang telah ditetapkan.
5. Proses penyusunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.3. Rencana Tindak lanjut

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2025 antara lain :

1. Mengoptimalkan sarana, sumber daya dan anggaran yang ada untuk mencapai target kinerja program, kegiatan dan subkegiatan yang telah ditetapkan;
2. Mengoptimalkan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.
3. Melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2025 akan dijadikan acuan dalam rangka penyusunan anggaran sehingga kebutuhan-kebutuhan yang belum terakomodir dapat terdani. Selanjutnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien dan ekonomis.

BUPATI PURWOREJO



YULI HASTUTI